RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RPJPD

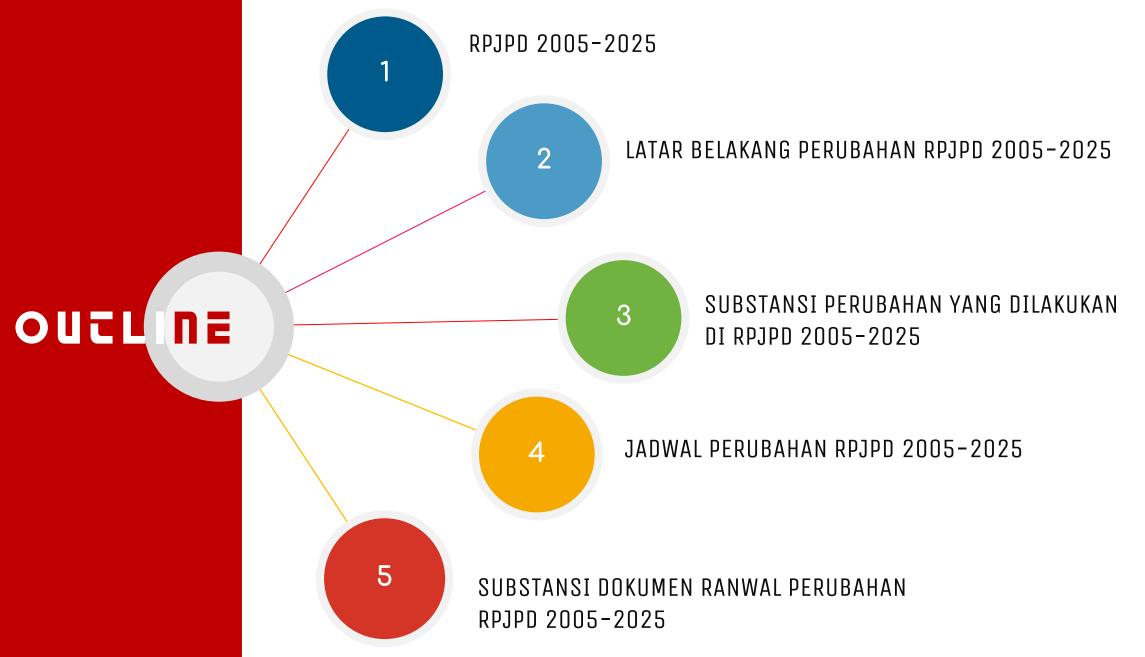
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025



DISAMPAIKAN DALAM FORUM KONSULTASI PUBLIK PERUBAHAN RPJPD 2005-2025 KOTA SEMARANG/







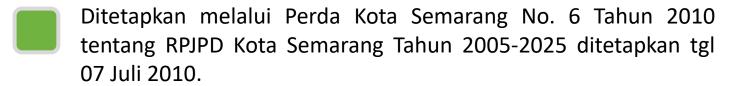
RPJPD 2005-2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 6 TAHUN 2010



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025

DOKUMEN RPJPD 2005-2025



- Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang dengan jangka waktu Panjang 20 (dua puluh) tahun.
- Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (dok. RPJMD).
- Terbagi kedalam 4 tahapan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD.

TAHAP I



RPJMD 2005-2010

TAHAP II



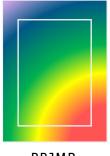
RPJMD 2010-2015

TAHAP III



RPJMD 2016-2021

TAHAP IV



RPJMD 2021-2025



LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJPD 2005-2025, ancara Lain:

Τ

PENYESUAIAN REGULASI YANG BELUM DIPEDOMANI DALAM RPJPD 2005-2025

PERDA RPJPD 2005-2025

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

SUBSTANSI

PERUBAHAN YANG HARUS DILAKUKAN

- 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- **UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah

Perubahan **kewenangan Kabupaten/ Kota**, diantaranya: Jenjang Pendidikan Menengah, Terminal Tipe A, Air Bawah Tanah (ABT) dan Bahan Galian C, Urusan Kelautan, Telekomunikasi, Penanganan NAPZA

2. .

- PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Kewajiban untuk menyusun **KLHS** dalam penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan

3. .

- **Perpres No. 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Mempedomani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

4. .

Perda Kota Semarang No. 14/2011 tentang RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031



Penyelarasan dengan kebijakan **RTRW** Kota Semarang. RPJPD 2005-2025 belum mempedomani Perda RTRW karena Perda RTRW ditetapkan setelah RPJPD ditetapkan ...LANJUTAN PENYESUAIAN REGULASI YANG BELUM DIPEDOMANI DALAM RPJPD 2005-2025

PERDA RPJPD 2005-2025

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

SUBSTANSI

PERUBAHAN YANG HARUS DILAKUKAN

5. Permendagri No. 54 Tahun 2010

H

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8/2008 ttg Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD



- Penyesuaian proses **penyusunan, sistematika, dan substansi** dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017
- Penambahan tujuan (beserta indikatornya)
- Sasaran pokok

PENYELARASAN DENGAN KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS AKTUAL

- o Implementasi menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- o Pengembangan SDM yang toleran dan unggul melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan sistem inovasi
- Perkembangan revolusi industri 4.0
- o Perkembangan ekonomi kreatif
- Inovasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan

III PENINGKATAN KUALITAS DOKUMEN RPJPD

- o Penajaman arah kebijakan tahap 4 RPJPD sebagai pedoman penyusunan RPJMD 2021-2025
- Memberikan instrumen (indikator) untuk evaluasi kebijakan jangka panjang



SUBSTANSI PERUBAHAN YANG DILAKUKAN DI RPJPD 2005-2025

SUBSTANSI PERUBAHAN YANG DILAKUKAN DI RPJPD 2005-2025

DASAR HUKUM

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

Menambahkan & mengganti referensi aturan-aturan terbaru yang belum ada di RPJPD yang berimplikasi pada perlunya perubahan **RPJPD**



SISTEMATIKA

TERDIRI DARI 5 BAB YAITU:

RPJPD 2005-2025

- 1. Pendahuluan
- 2. Kondisi Umum
- 3. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah
- 4. Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah
- 5. Penutup



PERMASALAHAN & **ISU STRATEGIS**

Memuat 30 isu strategis, namun Belum memuat rumusan permasalahan TERDIRI DARI 6 BAB, YAITU:

- 1. Pendahuluan
- Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
- 4. Visi dan Misi Daerah
- Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
- Penutup

Terdiri dari:

5 permasalahan pokok,

- 14 permasalahan,
- 25 akar masalah dan
- 14 isu strategis

Memuat rumusan permasalahan pokok, permasalahan, akar masalah dan isu strategis yang disesuaikan dengan permasalahan dan isu aktual di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional



VISI

1 RUMUSAN

1 RUMUSAN ---- (tetap)



MISI

5 RUMUSAN

5 RUMUSAN ----- (tetap)

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025 RPJPD 2005-2025 Tahap 1 → 46 rumusan arah kebijakan \circ Tahap 1 \rightarrow 46 rumusan arah kebijakan ----- (tetap) Tahap 2 → 46 rumusan arah kebijakan ○ Tahap 2 → 46 rumusan arah kebijakan ----- (tetap) Penyesuaian dg strategi & ○ Tahap 3 → 14 rumusan arah kebijakan -----Tahap 3 → 46 rumusan arah kebijakan ARAH KEBIJAKAN arah kebijakan RPJMD Tahap 4 → 46 rumusan arah kebijakan 2016-2021 Penajaman & penyesuaian ○ Tahap 4 → 18 rumusan arah kebijakan ----dg isu strategis TUJUAN TIDAK DIRUMUSKAN 5 TUJUAN dengan 7 INDIKATOR CAPAIAN SASARAN **36 RUMUSAN SASARAN** 6 RUMUSAN SASARAN POKOK ----- (diganti dengan sasaran pokok)

JADWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-

JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN

PERUBAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025

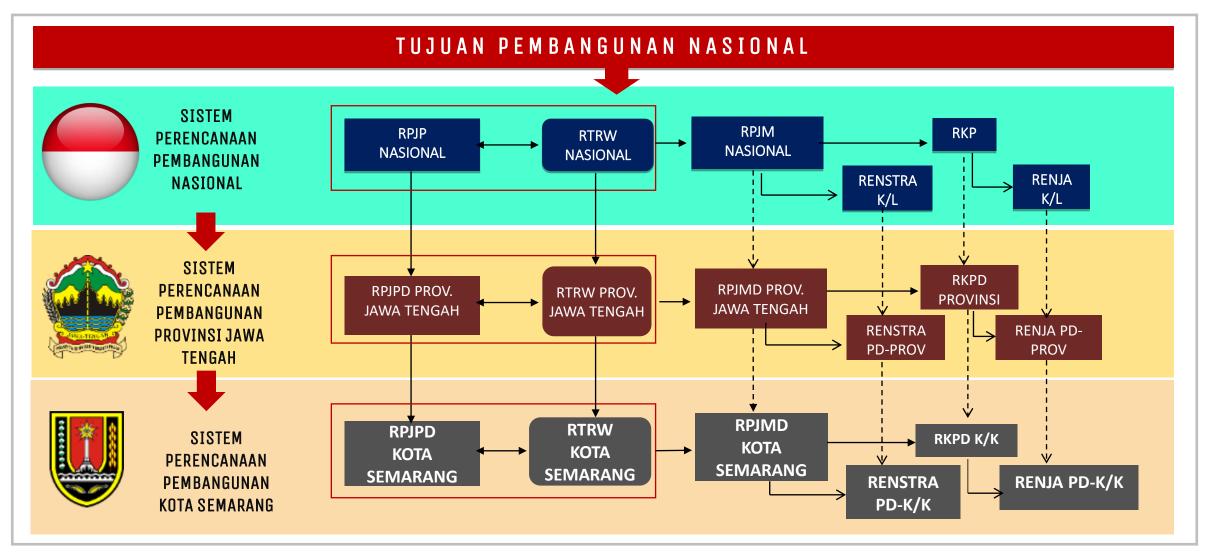


5

SUBSTANSI DOKUMEN RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

- KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN
- GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG (UPDATE DATA)
- O VISI
- o MISI
- o TUJUAN
- SASARAN
- ARAH KEBIJAKAN

KETERKAITAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN

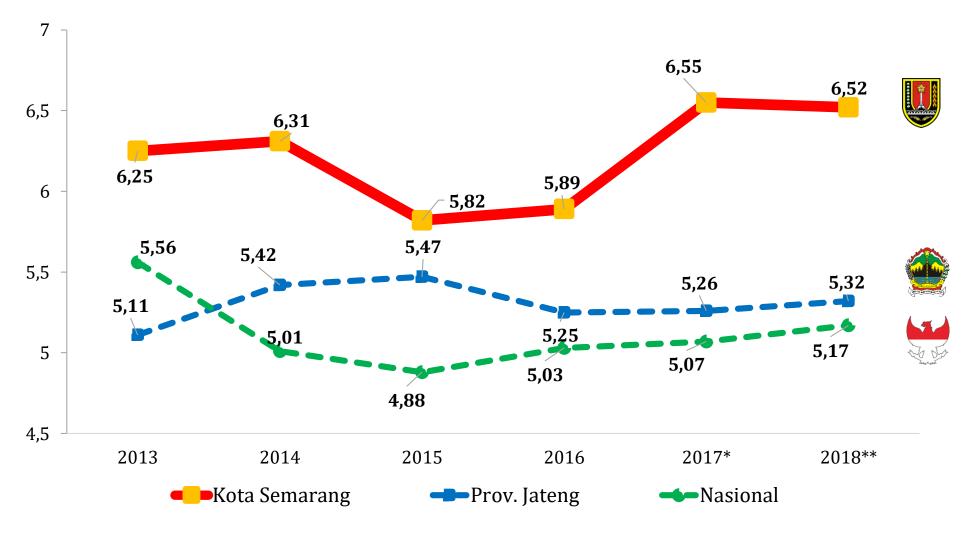


Perubahan Atas RPJPD Kota Semarang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPN dan RTRW serta memerhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang terwakili melalui penyusunan KLHS.

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SEMARANG

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SEMARANG

Tahun 2013-2018



Sumber: BPS, 2019

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SEMARANG

Tahun 2014-2018

Califor DDDD Lawangan Haaba Tahun Dagan 2010	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
Sektor PDRB Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010	2014	2015	2016	2017	2018	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.71	4.11	1.80	-0.64	4.05	
B. Pertambangan dan Penggalian	1.14	1.33	-6.31	-7.27	-8.36	
C. Industri Pengolahan	6.96	4.76	4.36	5.36	4.88	
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.72	2.15	7.19	6.21	6.39	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.52	1.34	2.73	3.29	3.60	
F. Konstruksi	4.48	6.02	6.09	6.37	6.29	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.79	4.37	5.62	5.63	6	
H. Transportasi dan Pergudangan	10.16	5.01	6.21	7.13	7.95	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.65	6.24	7.43	7.50	8.05	
J. Informasi dan Komunikasi	12	9.75	8.59	10.43	10.19	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.25	7.26	6.31	6.67	6.21	
L. Real Estate	7.29	8.16	7.93	8.56	8.57	
M, N. Jasa Perusahaan	8.02	8.48	8.85	9.87	10.71	
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.38	5.42	5.12	5.46	5.33	
P. Jasa Pendidikan	10.02	7.34	7.71	7.57	8.55	
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.20	6.40	7.89	12.71	4.97	
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8.54	3.28	7.09	9.25	11.12	
PDRB	6.31	5.82	5.89	6.55	6.52	

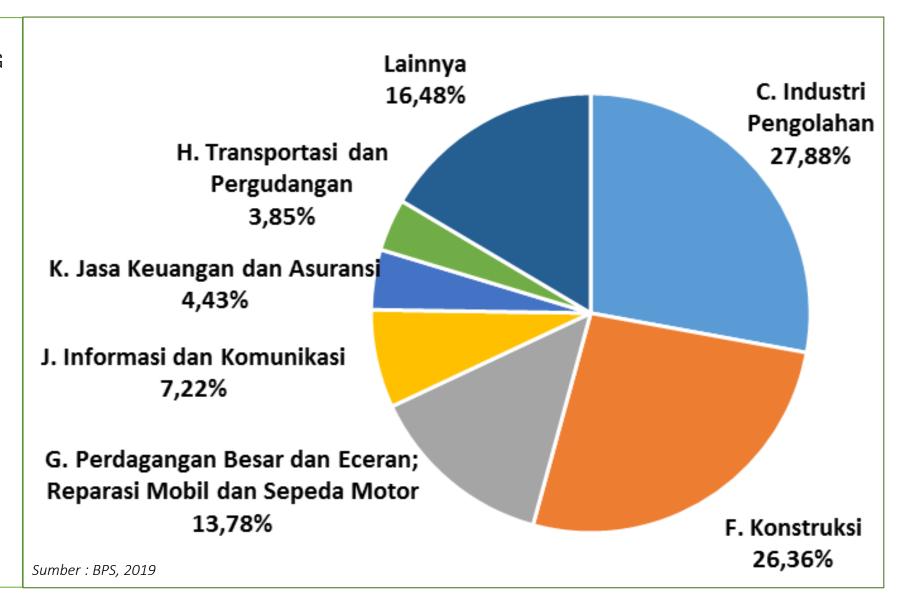
Sumber: BPS, 2019

Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebesar 6,52 persen atau melambat tipis jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang mencapai 6,55 persen. Pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah sektor jasa dimana laju pertumbuhan ekonomi Jasa Lainnya sebesar 11,12 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 10,71 persen.

STRUKTUR EKONOMI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

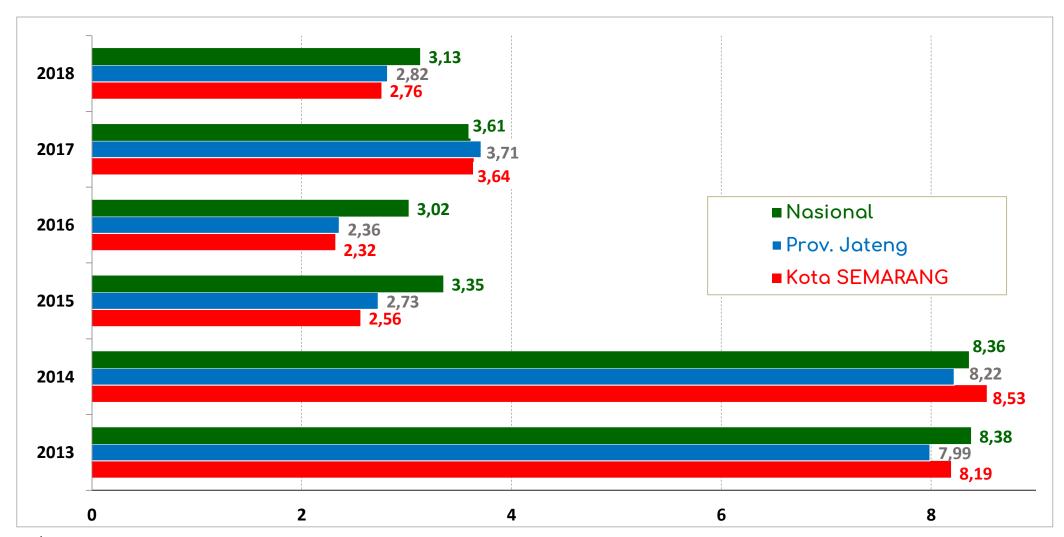
NILAI TAMBAH PRODUKSI KOTA SEMARANG DISUMBANG OLEH TIGA SEKTOR PEREKONOMIAN UTAMA DAERAH YAKNI:

- Sektor IndustriPengolahan (27,88%);
- Sektor Konstruksi (26,36%); dan
- Sektor Perdagangan
 Besar dan Eceran;
 Reparasi Mobil dan
 Sepeda Motor (13,78%).



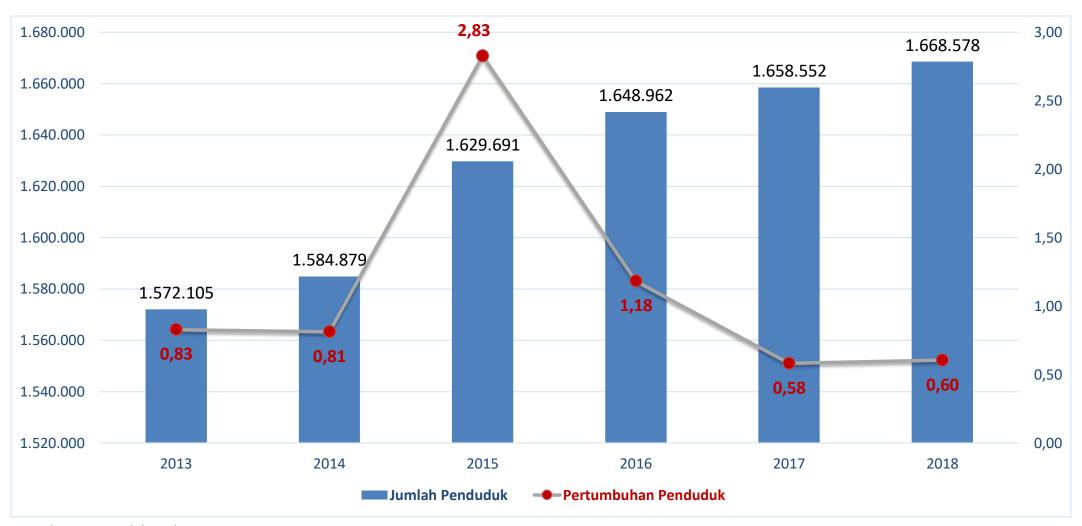
LAJU INFLASI (%) KOTA SEMARANG DENGAN NASIONAL

TAHUN 2013-2018



Sumber: BPS, 2019

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA SEMARANG Tahun 2013-2018



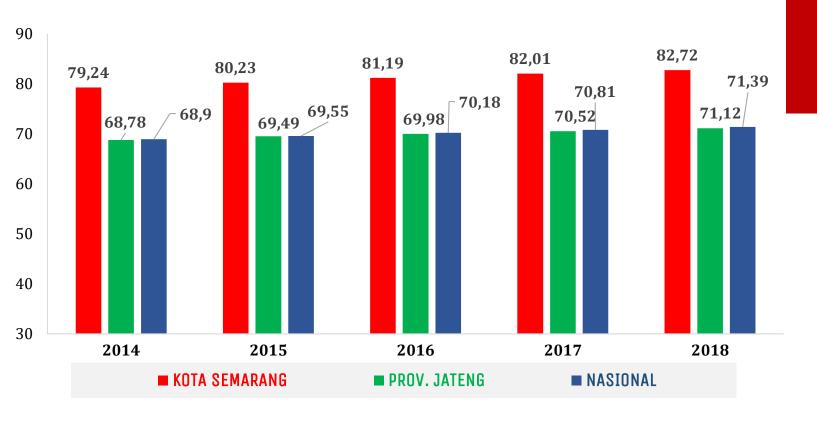
Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2019

SEBARAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2013-2018

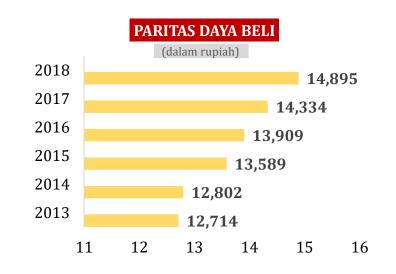
NO			PENDUDUK		%	Sex Ratio	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
110		Laki-laki	Laki-laki Perempuan Jumlah		70	SEX NATIO	(km2)	(jiwa/km2)
	KECAMATAN	(orang)	(orang)	(orang)				,
1	Semarang Tengah	29.322	31.751	61.073	3,66	92,35	6,14	9.946,74
2	Semarang Utara	61.938	63.857	125.795	7,54	96,99	10,97	11.467,18
3	Semarang Timur	35.647	37.844	73.491	4,40	94,19	7,70	9.544,29
4	Gayamsari	36.732	37.222	73.954	4,43	98,68	6,18	11.966,67
5	Genuk	57.300	56.952	114.252	6,85	100,61	27,39	4.171,30
6	Pedurungan	95.788	97.010	192.798	11,55	98,74	20,72	9.304,92
7	Semarang Selatan	33.827	35.548	69.375	4,16	95,16	5,93	11.698,99
8	Candisari	39.576	40.914	80.490	4,82	96,73	6,54	12.307,34
9	Gajah Mungkur	29.639	30.507	60.146	3,60	97,15	9,07	6.631,31
10	Tembalang	89.058	89.772	178.830	10,72	99,20	44,20	4.045,93
11	Banyumanik	69.203	70.724	139.927	8,39	97,85	25,69	5.446,75
12	Gunung Pati	47.035	46.831	93.866	5,63	100,44	54,11	1.734,73
13	Semarang Barat	78.337	80.681	159.018	9,53	97,09	21,74	7.314,54
14	Mijen	36.754	36.725	73.479	4,40	100,08	57,55	1.276,79
15	Ngaliyan	69.032	69.586	138.618	8,31	99,20	37,99	3.648,80
16	Tugu	16.776	16.690	33.466	2,01	100,52	31,78	1.053,05
TAF	HUN 2018	825.964	842.614	1.668.578	100,00	98,02	373,70	4.465,02
TAI	HUN 2017	823.173	835.379	1.658.552	-	98,54	373,70	4.438,19
TAF	HUN 2016	818.744	830.218	1.648.962	-	98,62	373,70	4.412,53
TAI	HUN 2015	808.348	821.343	1.629.691	-	98,42	373,70	4.360,96
TAI	IUN 2014	787.705	797.174	1.584.879	-	98,81	373,70	4.241,05
TAF	HUN 2013	781.176	790.929	1.572.105	-	98,77	373,70	4.206,86

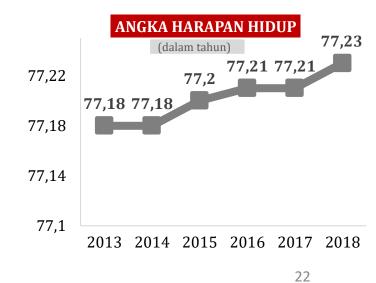
- Jika dilihat penyebarannya, sebagian besar penduduk berdomisili di Kecamatan Pedurungan. Sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Tugu.
- Jika melihat komposisi jenis kelamin, maka sebagian besar penduduk Kota Semarang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah penduduk sebesar 842.614 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 825.964 jiwa. Angka ini memperlihatkan sex ratio sejumlah 98,02 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk perempuan, hanya terdapat 98 penduduk laki-laki.
- Untuk kepadatan penduduk jiwa/km2 terbesar adalah Kecamatan Candisari dan terendah adalah Kecamatan Tugu.

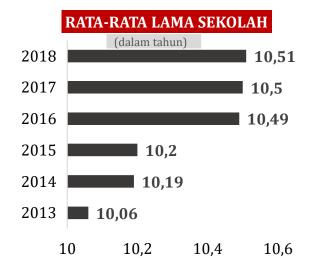
Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2019



PERBANDINGAN IPM KOTA SEMARANG DENGAN PROVINSI JATENG DAN NASIONAL TAHUN 2013-2017





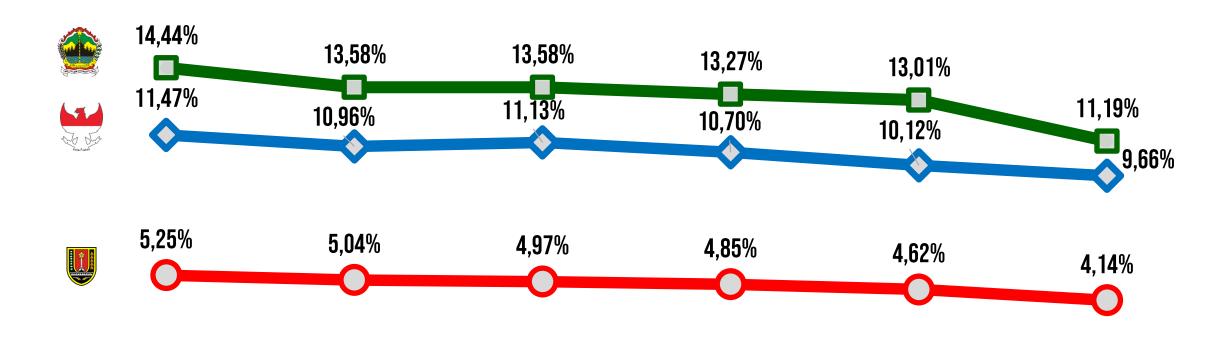




Sumber : BPS, 2019

ANGKA KEMISKINAN

DIBANDINGKAN DENGAN PROVINSI JATENG DAN NASIONAL



Sumber: BPS, 2019

2013

2014

2015

2016

2017

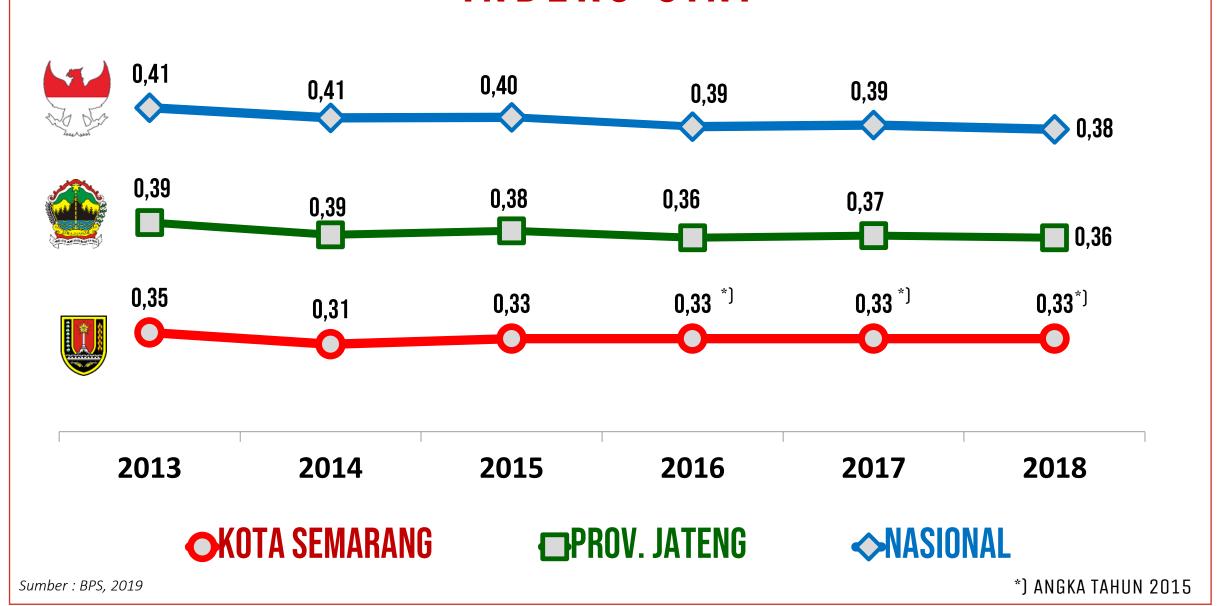
2018

KOTA SEMARANG

PROV. JATENG



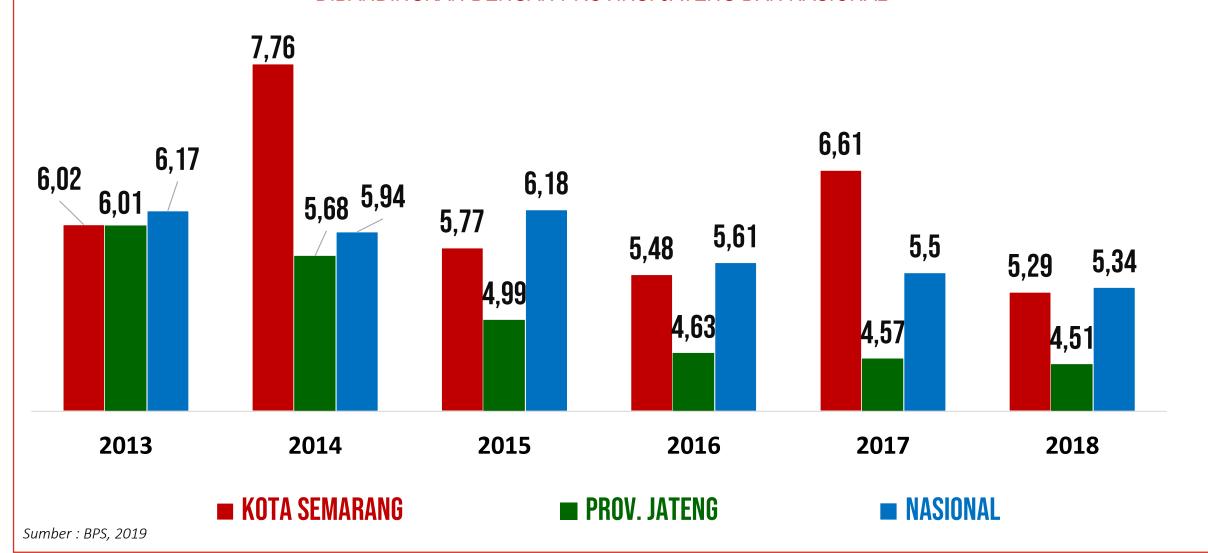
INDEKS GINI





[TINGKAC PENGANGGURAN TERBUKA]

DIBANDINGKAN DENGAN PROVINSI JATENG DAN NASIONAL



KINERJA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG, antara lain

II D A T A N	танип						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (%) *	81,78	82,60	88,07	90,19	88,72	89,54	
PERSENTASE KAWASAN BANJIR DAN ROB *	n/a	n/a	5,34	5,02	4,60	4,37	
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) **	n/a	n/a	44.84	44.84	50.93	51.94	
PERSENTASE LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH***	0,56	1,11	0,99	0,79	0,74	0,29	

*) Sumber : DPU Kota Semarang, 2019 **) Sumber : DLH Kota Semarang, 2019

^{***)} Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2018

KINERJA PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) **KOTA SEMARANG**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH n No 175 Km | 4 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)86608

Semarang, 30 Mei 201

|Lo /S/XVIII.SMG/05/2017 Tiga Berkas

Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Kepada Yth. Walikota Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolas dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentan Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemerika Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Lapora Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Lapon Keuangan Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuang: dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhad peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semara: TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendap "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ke Semarang Tahun Anggaran 2016.

2016 = WTP

Sumber: BPK, 2018



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

13.6 /S/XVIII.SM(7/05/2018 Satu Berkas

Hazil Pemerikasan atas Lacoran Keuangan Pemerintah Semarang Tahun Anggaran 2017

Yth. Walikota Semarang

Semarang

Berdssarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeril Pengelolaan dan Tanggungjawah Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 T 2006 tentang Baden Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, E Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keu-Perserintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, La Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarat Rasilsasii Anggaran, Laporan Perubahan Sakto Anggaran Lobih, Laporan Arus Kas, La

> Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian La Keuangan Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kesesuaian La Keuangan dengan Standar Akurtansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepa terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

> Pokok-pokok hasil pemerikasan atas Laporan Kecangan Pemerintah Kota Sen

1. Onini atas Laperan Kenangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan per "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sen

2017 = WTP



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

1b4 /S/XVIII.SMG/03/2019 Satu Berkas Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Tahun Anggaran 2018

Kenada Vth.

dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan

angan Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semaran

Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut;

1. Opini atas Laporan Keuangan

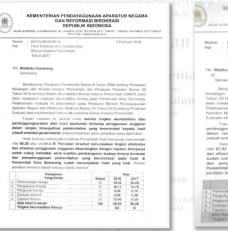
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wala Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

- 2. Sistem Pengendalian Inter-
- BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 a. Pengelolaan piutang dan pendapatan pajak daerah tidak tertib karena realisasi
- pendapatan pajak belum didukung dengan rincian wajib pajak; dan Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak tertib diantaranya kebijakan akuntansi belum sepenuhnya diterapkan, dan Aset lain-lain digunakan untuk menampung aset tetap jalan yang tidak diketahui aset tetap induknya.
- Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar Memerintahkan Kepala Bapenda supaya merevisi perjanjian Bapenda, BPKAD dan PT Bank Jateng dengan menambahkan klausul mekanisme pembayaran pajak melalui virtual account yang bersifat statis; dan

2018 = WTP

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA KOTA SEMARANG







2016 = CC

(55,94)

2017 = B

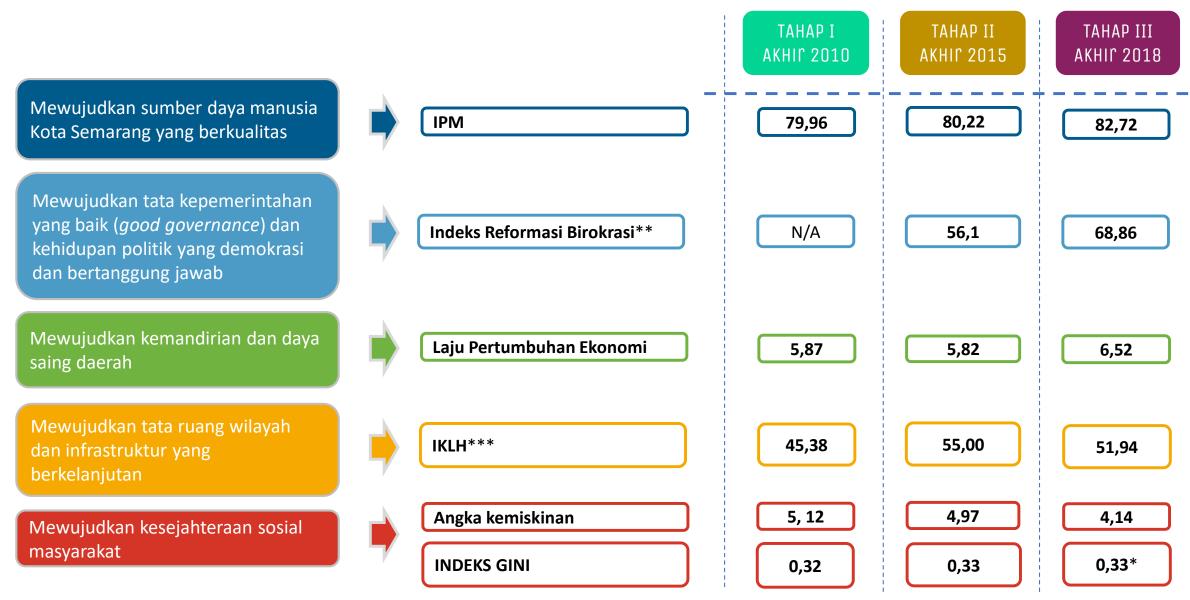
(60.28)

2018 = B

(67,92)

Sumber: KemenPan&RB, 2019

EVALUASI UMUM CAPAIAN RPJPD KOTA SEMARANG



^{*)} data tahun 2015

Sumber: BPS, 2019

VISI DAN MISI RPJPD KOTA SEMARANG

VISI RPJPD

"SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS, TERTIB DAN BERBUDAYA"

MISI RPJPD

FOKUS RPJPD

Mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas



sumber daya manusia

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan kehidupan politik yang demokrasi dan bertanggung jawab



таса кегога pemerintahan

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah



Dava saing EKONOMI

Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan



TELEGIANTEN SEJAHTEN Infrastruktur





кеsеjaнсегаап





KETERKAITAN **VISI RPJPD** DAN **VISI RPJMD** KOTA SEMARANG

VISI RPJPD 2005-2025

"SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS, TERTIB DAN BERBUDAYA"

RPJMD II 2010-2015

Pemantapan Sektorsektor Prioritas

RPJMD I 2005-2010

Penguatan Sektor-sektor Prioritas

Visi:
Semarang Kota
Metropolitan yang
religius berbasis
Perdagangan dan
iasa

Visi:
Terwujudnya
semarang kota
perdagangan dan
jasa yang berbudaya
menuju masyarakat
sejahtera

RPJMD III 2016-2021

Pencapaian Daya Saing Wilayah & Masyarakat

Visi:
Semarang kota
perdagangan dan
jasa yang hebat
menuju masyarakat

semákin sejahtera

RPJMD IV 2021-2025

Akselerasi pembangunan di berbagai bidang



Fokus perubahan adalah MENAJAMKAN arah kebijakan pembangunan tahap IV

TEMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SEMARANG

Semarang sebagai Kota

Mengakselerasi hasil-hasil pembangunan guna mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Mandiri, Melayani dan Berdaya Saing



Mewujudkan daya saing Kota

LANGKAH PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP IV

MENGANALISIS
KONSISTENSI
KEBIJAKAN RPJMD
EKSISTING



2

MENENTUKAN
PERMASALAHAN & ISU
STRATEGIS YANG
SECARA SPESIFIK
AKAN DIHADAPI PADA
TAHAP IV

9

IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN & ISU
STRATEGIS TAHAP III
DAPAT DIGUNAKAN,

DENGAN ASUMSI BAHWA
TIDAK SEMUA HAL
DIMAKSUD DAPAT
DIPECAHKAN PADA TAHAP III

4

SINKRONISASI KEBIJAKAN RPJPD PROV. JATENG & RPJPN

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELENGKAPINYA, KHUSUSNYA UNTUK PERIODE KE IV

KETERKAITAN VISI, MISI, DAN TUJUAN

PER TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG

VISI: "SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS, TERTIB DAN BERBUDAYA"

		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			
MISI	TUJUAN	TUJUAN	REALISASI (2005-2010)	REALISASI (2010-2015)	TAHAP III (2016-2021)	TAHAP IV (2021-2025)
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Semarang yang Berkualitas	1. Meningkatkan daya saing dan kualitas SDM	IPM	76,96	80,23	83,23	85,00
Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Bertanggung Jawab	2. Meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	na	56,10	> 72	> 75
3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	na	5,82	6,50	7,50
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah	4. Meningkatkan infrastruktur dan pengembangan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	na	45,38	55,00	65,00
dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	wilayah yang merata dan berkelanjutan	Indeks Daya saing Infrastruktur	na	na	na	na
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	5. Meningkatkan kesejahteraan	Angka Kemiskinan	5,12	4,97	4,53	4,00
Masyarakat	masyarakat	Indeks Gini	0,32	0,33	0,33*	0,31

MISI, TUJUAN DAN SASARAN POKOK RPJPD

KOTA SEMARANG 2005-2025

MISI	TUJUAN	SASARAN POKOK
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Semarang yang Berkualitas	1. Meningkatkan daya saing dan kualitas SDM	1. Meningkatnya daya saing SDM
2. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Bertanggung Jawab	2. Meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik	2. Meningkatnya profesionalisme birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani
3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	3. Meningkatnya pertumbuhan daerah yang berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	4. Meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang merata	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	dan berkelanjutan	5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan metropolitan
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6. Menguatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat

ARAH KEBIJAKAN TAHAP IV (2021-2025) PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

TUJUAN	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN TAHAP IV (RPJMD TAHUN 2021-2025)
		1. Pengembangan kompetensi angkatan kerja yang kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja
1. Meningkatkan daya	1. Meningkatnya daya saing SDM	2. Peningkatan kualitas Pendidikan
saing dan kualitas SDM		3. Peningkatan derajat dan akses layanan kesehatan
		4. Peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan
		5. Penguatan pembangunan inklusif
2. Meningkatkan tata	2. Meningkatnya	6. Penguatan kebijakan publik yang strategis
kelola pemerintah dan		7. Penguatan profesionalisme aparatur
pelayanan publik efektif, efisien, dan melayani	8. Pemantapan pelayanan publik yang terintegrasi (sudah termasuk <i>e-gov, smart city</i>)	
3. Mewujudkan		9. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis untuk pengembangan ekonomi
kemandirian ekonomi	3. Meningkatnya pertumbuhan	10. Penguatan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan
yang berkualitas dan	daerah yang berkelanjutan	11. Penguatan sinergitas perekonomian regional
berdaya saing		12. Penguatan iklim investasi yang berkualitas
4. Meningkatkan infrastruktur dan	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Peningkatan daya dukung dan daya tampung wilayah
pengembangan wilayah	5. Meningkatnya sarana dan	14. Penguatan konektivitas struktur ruang
yang merata &	prasarana pelayanan	15. Optimalisasi pemanfaatan ruang
berkelanjutan	metropolitan	16. Pengendalian pemanfaatan ruang
5. Meningkatkan	6. Menguatnya perlindungan	17. Penguatan jaminan social
kesejahteraan masyarakat	dan pemberdayaan sosial masyarakat	18. Pemberdayaan masyarakat marginal

MATUR NUWUN

